



Journal of Research Applications in Community Services



Copyright (c) Journal of Research Applications in Community Services
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License



p-ISSN: 2963-9271

VOL. 4 NO. 3 (2025) : 131-142

e-ISSN: 2962-9586

UMKM JAWARA : MODEL PENDAMPINGAN TERINTEGRASI PENTAHHELIX DALAM PENINGKATAN KAPASITAS LEGALITAS DAN DAYA SAING UMKM PANGAN, KOSMETIK, DAN OBAT TRADISIONAL DI DKI JAKARTA

Article History:

Received : 30-08-2025
Revised : 15-09-2025
Accepted : 24-09-2025
Online : 30-09-2025

Ajeng I. Rosalina¹, Rini Asri², Resta Satiti³, Anisa Nindita⁴

Corresponding author : Ajeng I. Rosalina¹

¹Balai Bsar Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta,

ajengrosalyne.air@gmail.com

²Balai Bsar Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, rini.asri@pom.go.id

³Balai Bsar Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, resta.satiti@pom.go.id

⁴Balai Bsar Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, anisa.nindita@pom.go.id

Abstract

The limited capacity for product legality and competitiveness of MSMEs in the food, cosmetics, and traditional medicine sectors in DKI Jakarta remains a significant obstacle to enhancing community economic capacity. Previous MSME mentoring programs have often been sectoral, fragmented, and focused solely on production aspects, making them ineffective in addressing systemic challenges. In contrast to previous sectoral mentoring programs, UMKM Jawaara offers a pentahelix model synergizing five actors (government, academia, business, community, media), integrated with digital systems, and based on local mentors (JakOfficers) as a sustainable strategy. The program was implemented in three phases: (1) multi-stakeholder mobilization, (2) capacity building (72-hour GMP training, digital guidance with e-commerce partners, free product testing facilitation), and (3) sustainable mentoring by 700 JakOfficers. Evaluation using integrated digital instruments (I-Jedar, Si-Doel, Si-Pitung) showed significant results: issuance of 2,062 distribution permits, increase in production facility compliance from 85% (2019) to 97.67% (2024), economic growth of mentored MSMEs exceeding 200%, and an increase in the Business Satisfaction Index (IKEPU) from 85.18% (2020) to 97.94% (2024). The study concludes that the pentahelix model effectively enhances MSME legality and competitiveness through collaborative approaches, continuous technical mentoring, and reputational incentives (UMKM Awards). The sustainability of this innovation is ensured by a budget allocation of IDR 365 billion (2023–2026) and the integration of strategic policies.

Keywords: MSMEs, pentahelix model, integrated mentoring, product legality, business competitiveness, Good manufacturing practice

Abstrak

Rendahnya legalitas dan daya saing UMKM pangan, kosmetik, dan obat tradisional di DKI Jakarta masih menjadi tantangan dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Selama ini, program pendampingan UMKM seringkali bersifat sektoral, terfragmentasi, dan hanya berfokus pada aspek produksi, sehingga kurang efektif dalam menjawab permasalahan sistemik. Berbeda dengan program pendampingan UMKM sebelumnya yang bersifat sektoral, UMKM Jawaara menawarkan model pentahelix dengan sinergi 5 aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media), terintegrasi sistem digital, dan berbasis pendamping lokal (JakOfficer) sebagai strategi berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dalam tiga fase: (1) mobilisasi multistakeholder, (2) penguatan kapasitas (pelatihan GMP 72 jam, bimbingan digital bersama e-commerce, fasilitasi pengujian gratis), dan (3) pendampingan berkelanjutan oleh 700 JakOfficer. Evaluasi menggunakan instrumen digital terpadu (I-Jedar, Si-Doel, Si-Pitung) menunjukkan hasil signifikan: penerbitan 2.062 nomor izin edar, peningkatan kepatuhan sarana produksi dari 85% (2019) menjadi 97,67% (2024), pertumbuhan ekonomi UMKM terdamping >200%, serta peningkatan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) dari 85,18% (2020) menjadi 97,94% (2024). Simpulan studi membuktikan efektivitas model pentahelix dalam meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM

melalui pendekatan kolaboratif, pendampingan teknis berkelanjutan, dan insentif reputasi (UMKM Awards). Keberlanjutan inovasi ini dijamin dengan alokasi anggaran Rp365 miliar (2023–2026) serta integrasi kebijakan strategis.

Kata kunci: *Usaha Mikro Kecil dan Menengah, model pentahelix, pendampingan terintegrasi, legalitas produk, daya saing usaha, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan produk obat dan makanan ilegal serta rendahnya kepatuhan standar produksi menjadi ancaman serius bagi keamanan konsumen dan ketahanan ekonomi nasional (Storti & De Grauwe, 2011). Laporan BPS (2023) menyatakan hanya 12,4% UMKM sektor pengolahan makanan di DKI memiliki sertifikat legalitas produk (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023). Sementara itu data hasil pengawasan Balai Besar POM Jakarta (2023) mengungkap 37% sarana di DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan, dengan 590 produk kedaluwarsa dan 5.659 item tanpa izin edar. Fenomena ini diperparah oleh tingginya proporsi UMKM sektor pangan dan farmasi yang belum tersertifikasi: hanya 1,59% dari 24.151 UMKM yang memiliki sertifikasi standar.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah UMKM dengan Jumlah UMKM yang Tersertifikasi di DKI Jakarta

Kode & Klasifikasi Usaha	Banyaknya Usaha	Memiliki Sertifikat	Tidak Memiliki Sertifikat	Sertifikasi Standar Nasional	Sertifikasi Nasional Lainnya	Sertifikasi Internasional
10 (Industri Makanan)	22,260	247	22,013	67	218	0
11 (Industri Minuman)	1,761	128	1,633	83	45	0
20 (Industri Bahan Kimia dan Kosmetik)	94	9	85	0	9	0
21 (Industri Farmasi & Obat)	36	0	36	0	0	0
Total DKI Jakarta	24,151	384	23,767	150	272	0

Kompleksitas permasalahan UMKM di wilayah urban seperti Jakarta bersifat multidimensi antara lain adalah rendahnya tingkat inovasi produk, proses serta sistem manajemen (Eravia et al., 2015) sedangkan, di sisi lain produk impor inovatif membanjiri pasar digital dengan harga murah (Manning & Soon, 2016). Selain itu, masalah terkait pendaftaran legalitas juga masih cukup besar. Tingkat pemahaman yang rendah (Zhao et al., 2024), serta tingginya biaya registrasi dan pengujian produk masih menjadi tantangan (Adaku et al., 2024). Sedangkan di era globalisasi ini, UMKM merupakan penggerak ekonomi berkelanjutan baik di negara berkembang maupun di negara maju (Prasanna et al., 2019). Ayyagari et al., (2014) pada studinya menyatakan bahwa UMKM mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja di suatu negara (Ayyagari et al., 2014).

Pemerintah melalui lembaga pusat dan daerah telah membuat berbagai program pendampingan UMKM untuk mendapatkan legalitas serta meningkatkan daya saing. Namun, program-program tersebut seringkali terbukti terfragmentasi, bersifat sektoral, dan pendekatannya single-actor (Ba et al., 2024). Program dari satu instansi biasanya hanya menyentuh satu aspek, seperti pelatihan produksi tanpa akses pasar, atau bantuan permodalan tanpa pendampingan legalitas. Kegagalan pendekatan sektoral dan triple helix (government-academia-industry) dalam menyelesaikan masalah sistemik UMKM telah diidentifikasi dalam studi Zuhroh et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder yang lebih luas menjadi sebuah imperatif (Zuhroh et al., 2025). Studi di Thailand (Sangnak, 2025) dan

Meksiko (Cabrera et al., 2020) juga menunjukkan bahwa model kolaborasi yang melibatkan aktor komunitas dan media (pentahelix) mampu mengurangi biaya registrasi hingga 25% dan meningkatkan efektivitas pendampingan secara signifikan dibandingkan model yang lebih sederhana.

Kebaruan inovasi ini terletak pada jawaban terhadap kegagalan model sebelumnya. Inovasi UMKM JAWARA hadir bukan hanya sebagai program tambahan, melainkan sebagai respons integratif yang secara eksplisit dirancang untuk mengatasi fragmentasi tersebut dengan memadukan kolaborasi pentahelix yang komprehensif: sinergi pemerintah, akademisi, bisnis (e-commerce dan retail), komunitas (asosiasi usaha dan JakOfficer sebagai extension agent lokal), dan media. Keunikan (novelty) model ini dibandingkan program sejenis di Indonesia terletak pada tiga pilar: (1) Konsep penganggaran terpadu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2) Pemanfaatan 700 JakOfficer sebagai tenaga pendamping lapangan yang didesentralisasikan, dan (3) Integrasi penuh sistem digital (I-Jedar, Si-Doel, Si-Pitung) untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan secara real-time. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip adaptive governance yang menekankan fleksibilitas institusional dalam menghadapi kompleksitas masalah publik (Folke et al., 2005).

Evaluasi awal menunjukkan peningkatan signifikan: 2062 izin edar terealisasi (2024), kepatuhan sarana produksi naik dari 85% (2019) menjadi 97,67% (2024), dan pertumbuhan ekonomi UMKM terdamping >200% (hal. 9–12). Namun, belum ada kajian akademik yang mengurai mekanisme kolaborasi dan faktor keberlanjutan model ini dalam konteks pengabdian masyarakat.

Artikel ini menganalisis implementasi UMKM JAWARA sebagai praktik terbaik pendampingan UMKM berbasis kolaborasi multipihak, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap kapasitas legalitas dan daya saing usaha.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Desain dan Partisipan

Program pendampingan UMKM JAWARA dilaksanakan melalui pendekatan participatory action research (Bradbury, 2015) dengan desain kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, media). Populasi sasaran mencakup 24.151 UMKM sektor pangan, kosmetik, dan obat tradisional di DKI Jakarta. Sampel dipilih secara purposif sebanyak 487 UMKM berdasarkan kriteria: (a) belum memiliki izin edar BPOM, (b) beroperasi minimal 1 tahun, dan (c) berlokasi di enam wilayah administratif DKI Jakarta.

2.2 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Evaluasi program dilaksanakan menggunakan empat instrumen digital terpadu: (1) Aplikasi I-Jedar untuk pemantauan real-time progres perizinan, (2) Sistem Si-Doel sebagai mekanisme audit kepatuhan standar produksi, dan (3) Platform Si-Pitung untuk pengukuran indikator kinerja berbasis outcome.

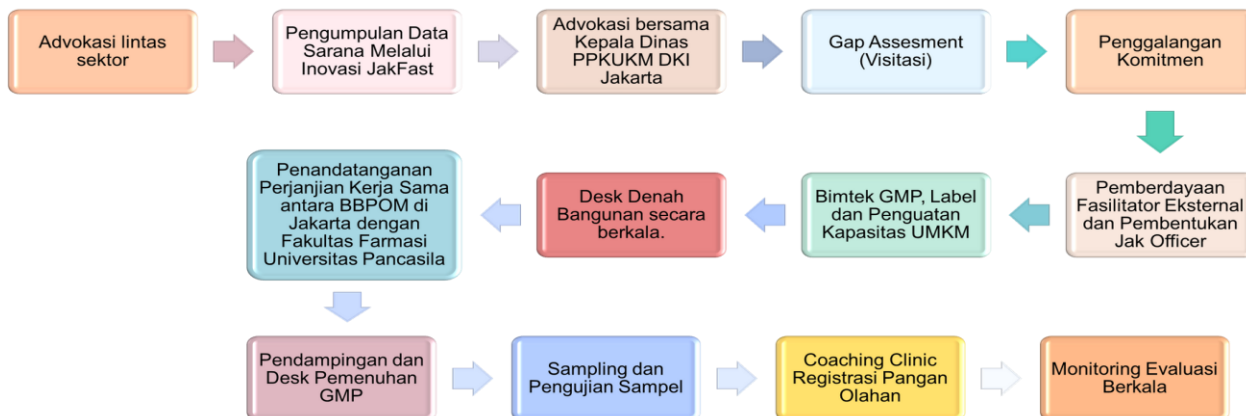
Keberhasilan inovasi diukur melalui kuesioner Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) (α -Cronbach=0.89). Data dianalisis secara kuantitatif (paired t-test untuk uji beda kepatuhan sebelum-sesudah intervensi; regresi linier untuk hubungan pelatihan-pertumbuhan ekonomi) dan kualitatif (thematic analysis pada transkrip wawancara). Validitas ekologis dijaga melalui penyesuaian modul pelatihan berbasis karakteristik wilayah, sementara replikabilitas model dijamin oleh standarisasi SOP Mikro No. POM-04.01/CFM.01/SOP.01/IK.7A.01.

2.3 Prosedur dan Intervensi Program

Pelaksanaan program diimplementasikan melalui tiga fase strategis terstruktur. Fase pertama merupakan mobilisasi multistakeholder, mencakup proses advokasi terintegrasi lintas sembilan instansi pemerintah daerah, penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen kolektif, serta penjangkaran calon penerima manfaat berbasis aplikasi JakFast untuk menjamin

prinsip transparansi dan akuntabilitas seleksi. Fase kedua berupa intervensi penguatan kapasitas (capacity building intervention) yang terdiri atas: (1) Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) intensif selama 72 jam per modul, (2) Bimbingan teknis pemasaran digital kolaboratif dengan platform e-commerce (Shopee), (3) Fasilitasi pengujian produk secara gratis di laboratorium terakreditasi melalui pendanaan APBD DKI Jakarta, dan (4) Coaching clinic perizinan bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI.

Fase ketiga melibatkan pendampingan berkelanjutan (sustainable mentoring) dengan memobilisasi 700 JakOfficer sebagai extension agent yang terbagi dalam peran Customer Relation Officer (pendampingan konsultasi digital) dan layanan Antar Jemput Izin Bermotor



Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan UMKM Jawa

(pendampingan lapangan). Balai Besar POM di Jakarta secara konsisten terus mengembangkan kompetensi tenaga pendamping Jak-Officer dengan diselenggarakannya pelatihan pendampingan Ijin Penerapan CPPOB, CPOTB secara Bertahap dan CPKB kepada tenaga pendamping kewirausahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Inovasi ini didukung kolaborasi strategis dengan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila untuk hilirisasi riset terapan.

Tabel 2. Kerangka Evaluasi Program UMKM Jawa

Tingkat	Deskripsi	Indikator Keberdayaan yang Diukur
Input	Sumber daya yang dialokasikan untuk program.	- Anggaran IDR 365 Miliar.
		- 700 JakOfficer.
Proses	Aktivitas dan intervensi program yang dilaksanakan.	- Dukungan 9 instansi pemerintah.
		- Laboratorium terakreditasi.
Output	Hasil langsung dan terukur dari kegiatan.	- Jumlah pelatihan GMP yang diselenggarakan.
		- Jumlah coaching clinic perizinan.
		- Jumlah kunjungan lapangan oleh JakOfficer.
		- Legalitas: Jumlah NIE yang diterbitkan (2.062).

		- Produksi: Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan. - Legalitas: Peningkatan pemahaman regulasi. - Regulasi: Kenaikan kepatuhan sarana (85% ke 97.67%). - Pemasaran: Peningkatan keterampilan digital marketing. - Pemasaran: Pertumbuhan ekonomi >200%, ekspor, penetrasi marketplace. - Kenaikan IKEPU (85.18% ke 97.94%), UMKM Awards.
Outcome	Perubahan perilaku, kapasitas, dan kinerja UMKM dalam jangka menengah.	
Impact	Dampak jangka panjang dan luas dari program terhadap ekonomi dan kesejahteraan.	

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebaruan Program Keunggulan Komparatif Model Pentahelix

Inovasi ini melibatkan sinergi multidimensi yang mencakup berbagai pihak. Model kolaborasi pentahelix terbukti efektif dalam mempercepat inovasi UMKM, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan hingga 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan model triple helix dan quadruple helix. Sebagai bukti empiris, studi kasus yang dilakukan di Meksiko menunjukkan bahwa kolaborasi serupa dapat mengurangi biaya registrasi produk UMKM hingga 25% (Cabrera et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa pendekatan pentahelix, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas, mampu menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan inovatif bagi pengembangan UMKM (Du et al., 2025).

Dari sisi Pemerintah, dukungan anggaran diberikan oleh Dinas PPKUKM DKI Jakarta untuk program pendampingan. Selain itu, pendampingan UMK telah difasilitasi oleh beberapa OPD lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM beserta suku dinas di 6 wilayah, Dinas Kesehatan beserta suku dinas 6 wilayah, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian beserta suku dinas 6 wilayah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pemprov DKI Jakarta, 2025).

Akademisi berperan memberikan dukungan teknis melalui Universitas Pancasila dan Universitas Prasetya Mulya. Dalam sektor Bisnis, kolaborasi dilakukan dengan platform e-commerce seperti Shopee serta asosiasi ritel untuk memperluas pasar UMKM. Sementara itu, Komunitas dilibatkan melalui peran JakOfficer dan asosiasi UMKM yang turut mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil di DKI Jakarta. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan yang komprehensif dengan memanfaatkan berbagai keahlian dan sumber daya dari berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di wilayah ini.

Inovasi pembentukan JakOfficer merepresentasikan terobosan strategis dalam tata kelola pendampingan UMKM sektor farmasi dan pangan di Indonesia. Kebaruan utamanya terletak pada model kolaborasi pionir antara lembaga pengawasan nasional (Balai Besar POM Jakarta) dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberdayakan tenaga pendamping lokal (terdiri atas JakPreneur, Customer Relation Officers/CRO, dan petugas Antar Jemput Izin Bermotor/AJIB) sebagai extension services dalam menjangkau UMKM. Pendekatan ini mengatasi dua keterbatasan yakni keterbatasan SDM institusional BPOM melalui desentralisasi fungsi pendampingan serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah dengan mengintegrasikan sumber daya lokal ke dalam sistem pengawasan terpadu (integrated regulatory ecosystem). Mekanisme ini secara empiris sejalan dengan temuan Sangnak, (2025) yang mengonfirmasi

bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkatkan efektivitas pendampingan UMKM (Sangnak, 2025).

Selain kebaruan yang telah disebutkan, inovasi dalam program UMKM Jawa juga menunjukkan beberapa terobosan lain yang patut dicatat. Salah satunya adalah pengembangan platform digital JakKonek, yang memungkinkan UMKM untuk memperoleh informasi dan pembelajaran secara mandiri dan terintegrasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Novela et al., (2024) tentang literasi digital yang mendukung konsep inklusivitas dan keterbukaan informasi, mempercepat proses pendampingan, dan meningkatkan literasi digital di kalangan UMKM (Novela et al., 2024). Studi ini membuktikan bahwa platform digital terintegrasi (seperti JakKonek) mempercepat adopsi teknologi UMKM, meningkatkan literasi digital, dan mendorong inklusivitas melalui akses informasi mandiri (Bonina et al., 2021). Hasilnya signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha.

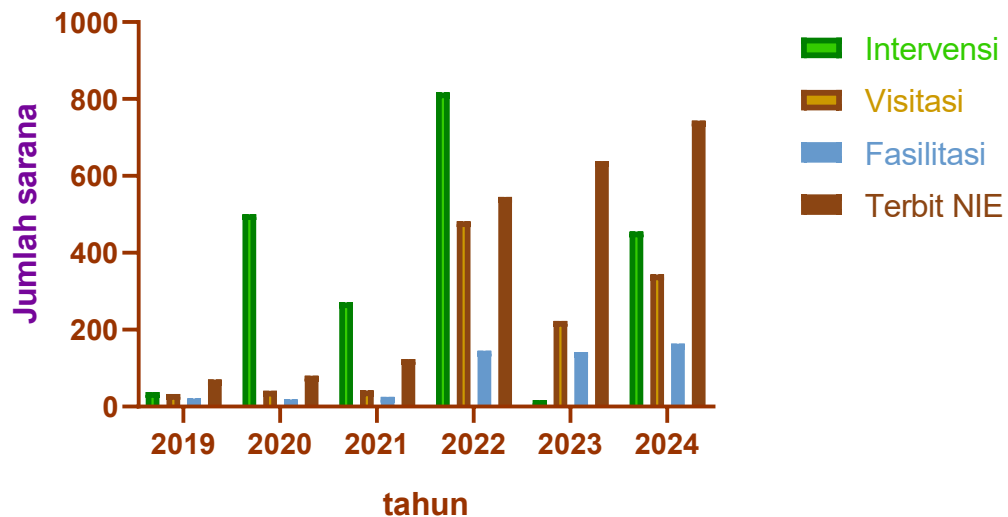
Selain itu, Program Rusunpreneur, yang merupakan bagian dari inovasi ini, mendukung pengembangan wirausaha dengan membangun rumah produksi bersama, seperti pengembangan usaha bakso di beberapa rusun. Ini merupakan contoh lain dari upaya pemberdayaan komunitas lokal yang tidak hanya meningkatkan keterampilan UMKM tetapi juga memperkuat jaringan ekonomi di tingkat mikro. Program seperti Rusunpreneur sejalan dengan temuan studi Lyons, (2015) yakni inkubasi usaha berbasis komunitas lokal memperkuat jaringan ekonomi mikro dan menciptakan ekosistem kewirausahaan inklusif (Lyons, 2015). Selanjutnya konsep "rumah produksi bersama" juga menjadi model kolektif yang meningkatkan keterampilan dan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan sumber daya lokal (Cairns et al., 2024).

Kebaruan lainnya terletak pada pendampingan berkelanjutan dengan penekanan pada aspek pemasaran dan promosi produk yang dilakukan melalui kolaborasi dengan e-commerce, akademisi, dan asosiasi usaha. Program ini tidak hanya mencakup pemberian Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk UMKM, tetapi juga membantu mereka dalam mengakses pasar lebih luas melalui pelatihan digital marketing yang disediakan oleh mitra e-commerce seperti Shopee. Kebaruan ini didasarkan atas temuan Gao et al., (2023) yang menyatakan bahwa kolaborasi dengan e-commerce dan pendampingan pemasaran digital secara signifikan meningkatkan akses pasar UMKM (Gao et al., 2023).

Untuk meningkatkan semangat pelaku usaha dalam menerapkan GMP, BBPOM di Jakarta memberikan insentif non-moneter (penghargaan) yakni UMKM Award untuk memotivasi pelaku usaha dalam menerapkan standar produksi (GMP/CPPOB), serta menciptakan benchmark kualitas di kalangan UMKM. Menurut Chanza et al., (2013) mekanisme pemberian penghargaan yang padad akhirnya merupakan *reputational incentive* terbukti secara berkelanjutan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan (Chanza et al., 2013).

3.2 Dampak Inovasi pada Manajemen dan Regulasi

UMKM Jawa terbukti mampu meningkatkan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) produk melalui program fasilitasi yang memudahkan pelaku usaha UMKM. Analisis korelasi Pearson mengungkap dua temuan kunci yakni, terdapat hubungan signifikan antara fasilitasi dan penerbitan NIE ($r = 0.990$; $p < 0.001$). Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendampingan teknis—seperti coaching clinic perizinan dan pengujian produk—merupakan faktor penentu utama percepatan legalitas UMKM. Selanjutnya, visitasi lapangan berkorelasi kuat dengan fasilitasi ($r = 0.865$; $p = 0.026$), menegaskan peran inspeksi sarana produksi sebagai pemicu rantai dukungan regulasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2023 (Rosalina et al., 2023). Temuan ini membuktikan keunggulan model pentahelix: kolaborasi yang terintegrasi antara BBPOM (regulator), Pemprov DKI (fasilitator anggaran dan SDM), dan JakOfficer (extension agent) berhasil mengatasi hambatan birokrasi dan fragmentasi layanan yang sering menjadi kendala dalam model pendampingan sektoral lama. Standarisasi SOP Mikro menjadi tulang punggung konsistensi layanan ini.

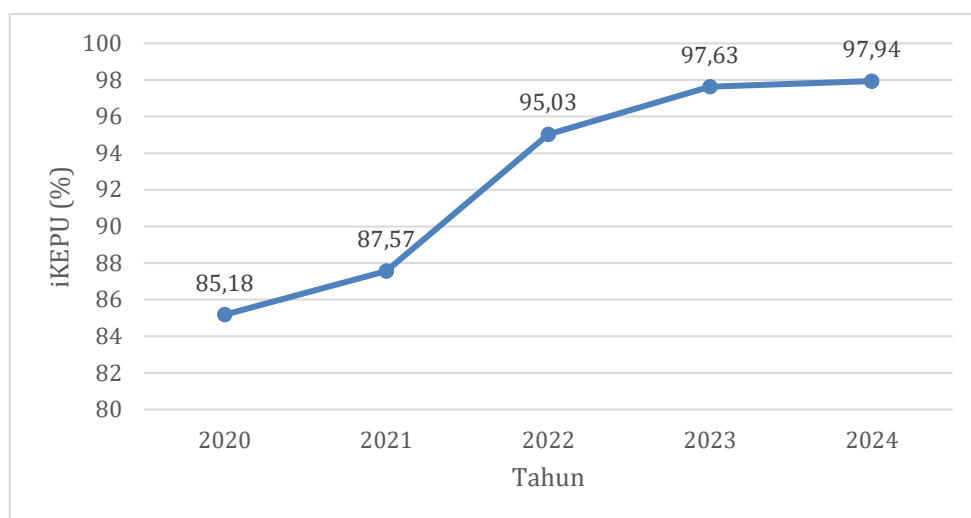


Gambar 2. Perbandingan jumlah sarana tiap tahapan kegiatan tahun 2019-2024
(sumber : data pendampingan UMKM Award dan data registrasi BPOM)

Di sisi lain, intervensi awal (sosialisasi, pelatihan dasar) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keluaran perizinan ($r = 0.124$; $p = 0.815$). Implikasinya, efektivitas program lebih ditentukan oleh pendampingan intensif (downstream facilitation) daripada intervensi awal (upstream intervention). Meskipun intervensi tidak berdampak langsung pada NIE, analisis jalur (path analysis) mengungkapkan pengaruh tidak signifikan melalui visitasi (koefisien tidak langsung $= 0.606 \times 0.788 = 0.477$). Temuan ini membuka ruang kajian tentang optimalisasi strategi intervensi berbasis risiko sarana produksi. Berdasarkan penelitian (Wattanapinyo & Mol, 2013).

3.3 Dampak Inovasi pada Indeks Kinerja BPOM

Dampak inovasi UMKM Jawa Tengah tercermin pada peningkatan signifikan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) dari 85,18% (2020) menjadi 97,94% (2024). Analisis regresi linier ($\hat{Y} = 81,996 + 3,558X$; $R^2 = 0,904$; $p < 0,01$) mengungkap bahwa 90,4% variasi peningkatan ini secara statistik disebabkan oleh implementasi program. Setiap tahun, IKEPU meningkat rata-rata 3,558 poin—didorong oleh skala pendampingan maksimal pada 2022 (57 bimbingan teknis, 1.236 responden survei). Kestabilan indeks $>97\%$ sejak 2023 menunjukkan konsolidasi keberhasilan model pentahelix dalam membangun ekosistem pendampingan berkelanjutan



Gambar 3. Perbandingan nilai target IKEPU terhadap realisasi

Dampak inovasi UMKM Jawa, khususnya terkait dengan Indikator Persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU), menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepuasan pelaku usaha yang terlibat dalam program ini. Berdasarkan data yang tercatat hingga Juli 2024, persentase IKEPU mengalami peningkatan yang konsisten dari 85,18% pada tahun 2020, menjadi 97,67% pada tahun 2024. Ini menunjukkan efektivitas program dalam memberikan dampak positif terhadap UMKM, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan yang diberikan oleh BBPOM di Jakarta.

Peningkatan yang sangat signifikan pada IKEPU ini tercermin dalam pencapaian jumlah kegiatan bimbingan terbanyak, yaitu 57 kegiatan pada tahun 2022, serta pencapaian responden survei terbanyak dengan lebih dari 1.236 responden. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha semakin merasakan manfaat yang diberikan oleh program UMKM Jawa, baik dalam hal bimbingan teknis, dukungan dalam perizinan, maupun peningkatan kualitas produk yang mereka hasilkan. Dengan peningkatan kepuasan ini, program UMKM Jawa tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan di DKI Jakarta.

3.4 Dampak pada Aspek Pemasaran dan Daya Saing

Dengan telah dimilikinya Nomor Izin Edar dari Badan POM akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMK yang telah didampingi program UMKM Jawa. Berikut perkiraan penjualan produk beberapa UMK binaan BBPOM di Jakarta setelah mendapatkan Nomor Izin Edar sebagai berikut:

Tabel 2. Efek Pendampingan terhadap Nilai Penjualan (data hasil wawancara)

Nama Sarana	Produk	Tahun Pendampingan	Penjualan	Nilai
Dapur Bunda By Uni	Rendang	2021	Ekspor ke Kuala Lumpur melalui kegiatan pameran dengan membawa produk sebanyak 200 pcs	Nilai ekspor per tahun: 96 Juta
Kultiva Co	Keripik tempe, buah	2022	Distribusi dalam negeri: online shop, retail-retail modern. Ekspor: Singapura, Kanada, USA, Malaysia, Taiwan, China, Australia	Nilai ekspor per tahun: 3 Miliar

Al Mubarakah	Madu	2022	Distribusi seluruh Indonesia melalui online shop. Rata-rata produk dalam 1 bulan 6000 botol	Nilai penjualan per tahun: 3.5 Miliar
GNB Drink	Minuman botanik	2022	Distribusi seluruh Indonesia	Nilai penjualan per tahun: 2 Miliar
Hana Kuliner	Minuman	2020	Distribusi melalui retail modern (AEON Mall). Penjualan per tahun 2300 s/d 2500 botol	Nilai penjualan per tahun: 350 Juta
Ain Eighur	Minyak gosok	2021	Distribusi dalam negeri melalui reseller. Penjualan produk perbulan 1000 botol	Nilai penjualan per tahun: 360 Juta

3.5 Adaptabilitas

Keberlanjutan sebuah inovasi sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberi dampak yang lebih besar pada sektor yang dilayani. Inovasi yang tidak memiliki dasar keberlanjutan cenderung gagal karena ketergantungan pada sumber daya eksternal yang terbatas atau pengelolaan yang tidak berkesinambungan (Ketata et al., 2015).

Untuk memastikan keberlanjutan program UMKM Jawa, terdapat berbagai sumber daya dan strategi yang disusun dengan matang. Dalam hal sumber daya anggaran, program ini mendapat dukungan penuh dari Dinas PPKUKM DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar 365 milyar rupiah untuk periode 2023–2026, yang akan digunakan untuk pembinaan UMKM pangan olahan, kosmetik, dan obat bahan alam (Dinas PPKUKM DKI Jakarta, 2023). Dukungan ini memastikan keberlanjutan finansial bagi pelaku UMKM di Jakarta. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia, BBPOM Jakarta telah mengembangkan 700 JakOfficer yang berfungsi sebagai pendamping UMKM. Mereka dilatih secara berkala untuk memperkuat kompetensi di bidang perizinan dan digitalisasi, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM menuju legalitas dan daya saing global. Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting, dengan pengembangan JakKonek sebagai platform digital yang memungkinkan akses cepat dan transparan untuk perizinan produk obat dan makanan, yang terintegrasi dengan berbagai kanal lain, seperti Jak Evo dan MPP-Virtual, memberikan akses informasi yang inklusif bagi UMKM di seluruh Jakarta. Selain itu, sumber daya sarana dan prasarana yang meliputi ruang pelatihan, laboratorium uji produk, serta layanan konsultasi inklusif juga disediakan untuk mendukung proses pembinaan yang berkelanjutan, memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan.

Strategi keberlanjutan program ini juga didukung oleh berbagai kebijakan strategi institusional yang meliputi penetapan UMKM Jawa dalam Renstra Dinas PPKUKM DKI Jakarta hingga 2026, serta penerbitan Keputusan Gubernur No. 330 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang akan memperkuat integrasi antar sektor dalam mendukung program ini. Di sisi strategi manajerial, program ini akan terus melakukan peningkatan kompetensi JakOfficer dan pegawai BBPOM Jakarta secara berkesinambungan, dengan fokus pada pengembangan kapasitas UMKM dalam pemasaran dan ekspor untuk meningkatkan daya saing mereka. Tak kalah penting, strategi sosial melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas PPKUKM, kementerian terkait, serta asosiasi usaha, akan mempercepat penerbitan izin edar dan membuka jaringan pemasaran yang lebih luas bagi UMKM. Selain itu, melibatkan mahasiswa dan fresh graduate sebagai fasilitator

eksternal memberikan kontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan strategi yang terstruktur, UMKM Jawa diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta dalam jangka panjang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Program UMKM Jawa membuktikan bahwa model pendampingan terintegrasi berbasis kolaborasi pentahelix secara signifikan meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM pangan, kosmetik, serta obat tradisional di DKI Jakarta. Dengan sinergi sumber daya pemerintah, keahlian akademik, kemitraan sektor swasta, pelibatan komunitas, dan jangkauan media, program ini berhasil mengatasi hambatan dalam memperoleh legalitas. Inovasi UMKM Jawa mampu meningkatkan kepatuhan sarana produksi hingga 97,67%, penerbitan 2.062 izin edar, dan kenaikan 12,76 poin pada Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU, 2019–2024). Pemanfaatan strategis 700 JakOfficer untuk pendampingan lapangan, didukung alat digital (I-Jedar, Si-Doel, Si-Pitung), memungkinkan pemantauan real-time. Lebih lanjut, insentif non-moneter (UMKM Awards) terbukti mampu mendorong penerapan GMP/CPPOB. Program ini membuktikan peningkatan keberdayaan UMKM secara komprehensif: (1) manajemen usaha lebih tertib dan legal, (2) produksi memenuhi standar GMP/CPPOB, (3) pemasaran produk menembus pasar internasional. Model pentahelix ini dapat direplikasi di provinsi lain. Untuk memperluas dampak program, perlu replikasi skala luas dengan adaptasi kerangka pentahelix ke provinsi lain serta memperdalam integrasi digital melalui fungsionalitas JakKonek dengan pemberian modul ekspor e-commerce khusus untuk membantu UMKM masuk pasar global.

DAFTAR RUJUKAN

- Adaku, A. A., Egyir, I. S., Gadegbeku, C., Kunadu, A. P.-H., Amanor-Boadu, V., & Laar, A. (2024). Barriers to ensuring and sustaining street food safety in a developing economy. *Heliyon*, 10(11), e32190. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32190>
- Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2014). Who creates jobs in developing countries? *Small Business Economics*, 43(1), 75–99. <https://doi.org/10.1007/s11187-014-9549-5>
- Ba, Y., Nair, S., & Kedia, M. (2024). Cross-sector collaboration, nonprofit readiness, and sustainability transitions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 53, 100933. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100933>
- Bonina, C., Koskinen, K., Eaton, B., & Gawer, A. (2021). Digital platforms for development: Foundations and research agenda. *Information Systems Journal*, 31(6), 869–902. <https://doi.org/10.1111/isj.12326>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta 2023*.
- Cabrera, M., López-Leyva, J., Peris-Ortiz, M., Orozco-Moreno, A., Francisco-Sánchez, J., & Meza-Arballo, O. (2020). A framework of penta-helix model to improve the sustainable competitiveness of the wine industry in Baja California based on innovative natural resource management. *E3S Web of Conferences*, 167, 06005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016706005>
- Cairns, I., Southern, A., & Whittam, G. (2024). Collective entrepreneurship in low-income communities: The importance of collective ownership, collective processes and collective goods. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 42(3), 335–364. <https://doi.org/10.1177/02662426231197939>
- Chanza, A. W. D., Snelgar, R. J., & Louw, G. J. (2013). The motivational value of rewards amongst Malawi's health professionals. *SA Journal of Human Resource Management*, 11(1). <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v11i1.517>
- Dinas PPKUKM DKI Jakarta. (2023). Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. In *Sustainability*

- (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Du, J., Li, J., Liang, B., & Yan, Z. (2025). Optimizing Sustainable Entrepreneurial Ecosystems: The Role of Government-Certified Incubators in Early-Stage Financing. *Sustainability*, 17(9), 3854. <https://doi.org/10.3390/su17093854>
- Eravia, D., Handayani, T., & Julina. (2015). The Opportunities and Threats of Small and Medium Enterprises in Pekanbaru: Comparison between SMEs in Food and Restaurant Industries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.289>
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). ADAPTIVE GOVERNANCE OF SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS. *Annual Review of Environment and Resources*, 30(1), 441–473. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>
- Gao, J., Siddik, A. B., Khawar Abbas, S., Hamayun, M., Masukujjaman, M., & Alam, S. S. (2023). Impact of E-Commerce and Digital Marketing Adoption on the Financial and Sustainability Performance of MSMEs during the COVID-19 Pandemic: An Empirical Study. *Sustainability*, 15(2), 1594. <https://doi.org/10.3390/su15021594>
- Ketata, I., Sofka, W., & Grimpe, C. (2015). The role of internal capabilities and firms' environment for sustainable innovation: evidence for Germany. *R&D Management*, 45(1), 60–75. <https://doi.org/10.1111/radm.12052>
- Lyons, T. S. (2015). Entrepreneurship and community development: what matters and why? *Community Development*, 46(5), 456–460. <https://doi.org/10.1080/15575330.2015.1085194>
- Manning, L., & Soon, J. M. (2016). Food Safety, Food Fraud, and Food Defense: A Fast Evolving Literature. *Journal of Food Science*, 81(4). <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13256>
- Novela, I., Sawitri, H. S. R., Riani, A. L., Istiqomah, S., Suprapti, A. R., & Harsono, M. (2024). Digital Literacy on SME Business Performance and The Mediating Role of Entrepreneurial Skills. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.10.3.847>
- Pemprov DKI Jakarta. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.
- Prasanna, R., Jayasundara, J., Naradda Gamage, S. K., Ekanayake, E., Rajapakshe, P., & Abeyrathne, G. (2019). Sustainability of SMEs in the Competition: A Systemic Review on Technological Challenges and SME Performance. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 5(4), 100. <https://doi.org/10.3390/joitmc5040100>
- Rosalina, A. I., Rosydah, R., Satiti, R., & Anggraini, L. (2023). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi. *CAKRAWALA*, 17(1). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i1.444>
- Sangnak, D. (2025). Sustainable tourism development in Thailand: The role of agricultural tourism and government support for SMEs. *Sustainable Futures*, 9, 100782. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100782>
- Storti, C. C., & De Grauwe, P. (Eds.). (2011). *Illicit Trade and the Global Economy*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/8919.001.0001>
- Wattanapinyo, A., & Mol, A. P. J. (2013). Ecological modernization and environmental policy reform in Thailand: the case of food processing SMEs. *Sustainable Development*, 21(5), 309–323. <https://doi.org/10.1002/sd.506>
- Zhao, T., Li, T., Liu, D., & Luo, Y. (2024). The impact of food safety regulatory information intervention on enterprises' production violations in China: a randomized intervention experiment. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7.

<https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1245773>

Zuhroh, D., Jermias, J., Ratnasari, S. L., Sriyono, Nurjanah, E., & Fahlevi, M. (2025). The impact of sharing economy platforms, management accounting systems, and demographic factors on financial performance: Exploring the role of formal and informal education in MSMEs. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1), 100447. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100447>